



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA**

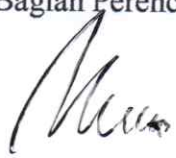
**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAL II
TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp/Fax : (0322) 316147
e-mail : disnaker@lamongankab.go.id website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  <u>HARTONO, S. Sos</u> NIP. 19691002 199703 1 005
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  <u>ADANG MOELYONO, S.H., M.Kn</u> NIP. 19760216 200312 1 002
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja  <u>AGUS CAHYONO, S.E., M.Si.</u> NIP. 19650808 199503 1 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rencana Monitoring Pi
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2023
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:							
1	1. Meningkatkan Program Pelatihan yang telah diadakan dan menambah kuota peserta pelatihan 2. Kerjasama dengan OPD Terkait untuk memfasilitasi penduduk yang bekerja 3. Pelaksanaan Job Fair	1. Melaksanakan Monev atas Program Pelatihan yang telah diadakan 2. Terus berkoordinasi dengan OPD Terkait 3. Melaksanakan Monev kegiatan Job Fair	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris, Kabid	Januari-Desember 2023	1.Tribulan I-IV 2.Tribulan I-IV 3. Tribulan III	Sudah dilaksanakan 1. Pelatihan di Tribulan II 2. Koordinasi dengan OPD Terkait Tribulan II 3. Belum terlaksana	
Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:							
1	UJK BNSP yang tidak terkafer Dana APBD bisa di usulkan ke dana APBN BPVP Sidoarjo	Evaluasi dan Koordinasi	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2023	UJK BNSP APBD 1.Tribulan I 2.Tribulan II 3. Tribulan III	Sudah dilaksanakan UJK BNSP APBD 1. Menjahit 1 dan	

					4. Tribulan IV UJK BNSP APBN 1. Tribulan I 2. Tribulan III	Servi Sepeda Motor Tribulan 1 2. Tata Rias Pengantin 1 dan Teknik Pendingin/AC di Tribulan II 3. Belum terlaksana 4. Belum terlaksana UJK BNSP APBN 1. Pembuatan Roti dan Kue 1, Tata Rias Pengantin dan Hantaran 1, Plat Welder SMAW 1G Tribulan I 2. Belum terlaksana	
2	Melakukan monitoring dan evaluasi LPK	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan III	Belum Terlaksana	
3	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Melaksanakan Bimtek Peningkatan Produktivitas bagi UMKM	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2023	Tribulan IV	Belum Terlaksana	

4	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Melaksanakan Bimtek Pengukuran Produktivitas Perusahaan dan Pelaksanaan Monitoring ke Perusahaan Kecil	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2023	Tribulan III dan Tribulan IV	Belum Terlaksana	
5	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penerima Tenaga Kerja	Melakukan Koordinasi dan Monitoring	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan tiap tribulan	
6	Menyiapkan sarana aplikasi informasi pasar kerja berbasis online	Pembuatan Aplikasi PELIKET dan Pelaksanaan Bursa Kerja (JMF) serta Pelaksanaan Sosialisasi Bursa Kerja Khusus	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2023	Pembuatan Aplikasi PLIKET Tribulan III	Belum Terlaksana	
7	1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal 2. Koordinasi dengan Direktorat PTKLN	Melakukan Sosialisasi	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan II-III	Sosialisasi pada Tribulan II dilaksanakan di BLK Disnaker Kab. Lamongan yang mana sasarannya merupakan alumni atau mahasiswa perguruan tinggi jurusan keperawatan. Sosialisasi	

						tersebut bertemakan tentang sosialisasi pencegahan PMI ilegal.	
8	Melakukan evaluasi atas pembinaan yang diberikan ke perusahaan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Januari-Desember 2023	Tibulan I-IV	Sudah dilaksanakan ketika ada aduan masalah dan diselesaikan secara win win solution	
9	1. Melaksanakan mediasi tripartit 2. Mencari penyelesaian secara win win solution	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Januari-Desember 2023	Tibulan I-II	Sudah dilaksanakan pada Tribulan I dan Tribulan II	
10	Koordinasi dengan Kemendes dan Disnaker Provinsi	Melakukan Koordinasi dan Monitoring	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2023	Tibulan I-IV	Sudah terlaksana	
11	1. Bila ada program pendidikan instruktur di provinsi agar mengikuti 2. Ada penambahan instruktur dan CPNS baru	Evaluasi dan Koordinasi	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Belum terlaksana	

12	Ada MOU dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana agar lulusan dapat link and match dengan dunia Industri dan usaha	Evaluasi dan Koordinasi	Kabid Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Belum Terlaksana	
13	Melakukan koordinasi dan monitoring kepada PPTK untuk secepatnya membuat laporan realisasi kinerja	Melakukan Koordinasi, Reviu dan Monev	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan setiap Tribulan	
14	Menghimbau kepada pemegang anggaran untuk secepatnya membuat realisasi laporan terkait rencana kegiatan kedepan	Melakukan Koordinasi dan Monitoring, Reviu RAK dan Anggaran	Sekretaris, Kasubbag Keuangan	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan	
15	1. Bimbingan teknis penyusunan RTK Mikro bagi perusahaan 2. Bekerjasama dengan Disnaker Provinsi	Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan II	Sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2023	
16	1. Validasi Perda PTKA pada sistem PTKA Daerah 2. Kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja	Melakukan Koordinasi dan Monitoring	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan	

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Monitor Risk Even & RTP
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian : 2023
Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja
Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:										
1	Rendahnya Penduduk yang Bekerja	ROO.23.07.33.01	-	Masih banyaknya Angkatan Kerja yang belum mendapat pekerjaan	Tingginya Tingkat Penganggura n Terbuka	-	1. Meningkatkan Program Pelatihan yang telah diadakan dan menambah kuota peserta pelatihan 2. Kerjasama dengan OPD Terkait untuk memfasilitasi penduduk yang bekerja 3. Pelaksanaan Job Fair	Januari-Desember 2023	1.Tribulan I-IV 2.Tribulan I-IV 3. Tribulan III	Sudah dilaksanakan 1. Pelatihan di Tribulan I-II 2. Koordinasi dengan OPD Terkait Tribulan I-II 3. Belum terlaksana

Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:										
1	Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi	ROO.23.07.33.01	-	Anggaran Terbatas	Belum Bisa di akui Kompetensi secara Nasional	-	UJK BNSP yang tidak terkafer Dana APBD bisa di usulkan ke dana APBN BPVP Sidoarjo	Januari-Desember 2023	UJK BNSP APBD 1.Tribulan I 2.Tribulan II 3. Tribulan III 4. Tribulan IV UJK BNSP APBN 1. Tribulan I 2. Tribulan III	Sudah dilaksanakan UJK BNSP APBD 1. Menjahit 1 dan Servi Sepeda Motor Tribulan 1 2. Tata Rias Pengantin 1 dan Teknik Pendingin/A C di Tribulan II 3. Belum terlaksana 4. Belum terlaksana UJK BNSP APBN 1. Pembuatan Roti dan Kue 1, Tata Rias Pengantin dan Hantaran 1, Plat Welder SMAW 1G Tribulan I 2. Belum terlaksana

2	Belum Terstandarisasi ya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	ROO.23.07.33.02	-	Minimnya SDM Pengelola, belum adanya anggaran untuk akreditasi	Masih kurangnya pengetahuan untuk manage lembaga dengan baik	-	Melakukan monitoring dan evaluasi LPK	Januari-Desember 2023	Tribulan III	Belum Terlaksana
3	Terbatasnya Konsultasi Produktifitas Perusahaan Kecil	ROO.23.07.33.03	-	Minimnya perusahaan kecil mendapatkan konsultasi produktifitas	Rendahnya produktifitas perusahaan kecil	-	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Januari-Desember 2023	Tribulan IV	Belum Terlaksana
4	Terbatasnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	ROO.23.07.33.04	-	Minimnya perusahaan kecil yang menerapkan progam peningkatan produktifitas	Rendahnya penerapan progam peningkatan produktifitas	-	Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil	Januari-Desember 2023	Tribulan III dan Tribulan IV	Belum Terlaksana
5	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang Belum Bekerja	ROO.23.07.33.05	-	Minimnya Informasi Lowongan Kerja	Banyaknya calon tenaga kerja belum terserap	-	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penerimaan Tenaga Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan tiap tribulan

6	Rendahnya Kesempatan Kerja	ROO.23.07.33.06	-	Minimnya fasilitas yang mempertemukan antara perusahaan dan pencari kerja	Rendahnya penyerapan penempatan kerja	-	Menyiapkan sarana aplikasi informasi pasar kerja berbasis online	Januari-Desember 2023	Pembuatan Aplikasi PLIKET Tribulan III	Belum Terlaksana, JMF telah dilaksanakan pada Tribulan III
7	Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal	ROO.23.07.33.07	-	Masih adanya PMI Ilegal	Deportasi/Pe mulangan	-	1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal 2. Koordinasi dengan Direktorat PTKLN	Januari-Desember 2023	Tribulan II-III	Sosialisasi pada Tribulan II dilaksanakan di BLK Disnaker Kab. Lamongan yang mana sasarannya merupakan alumni atau mahasiswa perguruan tinggi jurusan keperawatan. Sosialisasi tersebut bertemakan tentang sosialisasi pencegahan PMI Ilegal.

8	Rendahnya Kepatuhan Perusahaan dalam Membuat Peraturan dan Memenuhi Syarat-syarat Kerja	ROO.23.07.33.08	-	Kurangnya kesadaran perusahaan untuk memahami syarat-syarat kerja	Masih banyak pekerja yang dirugikan	-	Melakukan evaluasi atas pembinaan yang diberikan ke perusahaan	Januari-Desember 2023	Tibulan I-IV	Sudah dilaksanakan ketika ada aduan masalah dan diselesaikan secara win win solution
9	Rendahnya Kesadaran Perusahaan memberikan Hak Pekerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan	ROO.23.07.33.09	-	Kurangnya minat Perusahaan untuk belajar tentang Peraturan Perundang-Undangan terbaru khususnya di Bidang Ketenagakerjaan	Muncul aduan karena belum terpenuhinya hak dari pekerja	-	1. Melaksanakan mediasi tripartit 2. Mencari penyelesaian secara win win solution	Januari-Desember 2023	Tibulan I-II	Sudah dilaksanakan pada Tribunal I dan Tribunal II
10	Tertundanya penempatan calon transmigran	ROO.23.07.33.10	-	Tertundanya pemberangkatan Caltrans	Panjangnya daftar tunggu Caltrans	-	Koordinasi dengan Kemendes dan Disnaker Provinsi	Januari-Desember 2023	Tibulan I-IV	Sudah terlaksana

11	Belum Tersedianya Instruktur	ROO.23.07.33.11	-	Tidak ada CPNS di tunjukan sebagai instruktur	Masih memakai Instruktur Non ASN	-	1. Bila ada program pendidikan instruktur di provinsi agar mengikuti 2. Ada penambahan instruktur dan CPNS baru	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Belum terlaksana
12	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelatihan	ROO.23.07.33.12	-	Anggaran bersumber dari DBHCHT tidak boleh pembelian alat PMK 215/PMK.07/2021	1. Mengoptimal kan sarana dan prasarana yang ada 2. Pakai dana selain DBHCHT (Cukai)	-	Ada MOU dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana agar lulusan dapat link and match dengan dunia Industri dan usaha	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Belum terlaksana
13	Penyampaian dokumen perencanaan dan evaluasi belum tepat waktu	ROO.23.07.33.13	Tribulan I, II, III dan IV	Data capaian kinerja dan data pendukung laporan tidak segera dikumpulkan di Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Penyampaian laporan pertanggungj awaban Perangkat Daerah tidak tepat waktu	-	Melakukan koordinasi dan monitoring kepada PPTK untuk secepatnya membuat laporan realisasi kinerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan setiap Tribulan
14	Penyusunan laporan keuangan tidak	ROO.23.07.33.14	-	Karena adanya perubahan peraturan dari	Laporan penyusunan dokumen	-	Menghimbau kepada pemegang	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan

	tepat waktu			Pusat serta Penundaan pembayaran belanja kegiatan	administrasi keuangan perlu direview serta mempengaruhi proses pencairan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Lamongan		anggaran untuk secepatnya membuat realisasi laporan terkait rencana kegiatan kedepan			
15	Perusahaan belum melakukan/melaporkan RTK mikro	ROO.23.07.33.15	-	Belum tersusunnya RTK	Lowongan Tenaga Kerja belum terintegrasi	-	1. Bimbingan teknis penyusunan RTK Mikro bagi perusahaan 2. Bekerjasama dengan Disnaker Provinsi	Januari-Desember 2023	Tribulan II	Sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2023
16	Penggunaan TKA menjadi Retribusi Daerah jika dengan Perpanjangan IMTA	ROO.23.07.33.16	-	Belum Optimalnya alih teknologi	Ketergantungan terhadap TKA	-	1. Validasi Perda PTKA pada sistem PTKA Daerah 2. Kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja	Januari-Desember 2023	Tribulan I-IV	Sudah dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan antara lain:

- Kurangnya pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian risiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi risiko. Tindakan pengendalian diperlukan evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.